

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN PALESTINA

Disadari atau tidak, Amerika Serikat (AS) memegang peranan penting dalam percaturan politik global khususnya di Timur Tengah. Sebab AS merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi di dunia serta AS yang memiliki hak veto sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan Palestina merupakan suatu wilayah yang terus berjuang untuk mendapatkan kedaulatan sebagai sebuah negara yang merdeka. Karena itu, Palestina tetap menjaga hubungan dengan AS demi pengakuan negara Palestina yang berdaulat di PBB.

A. Amerika Serikat

Sejak runtuhnya komunisme di akhir dekade 90-an, banyak pihak yang mengatakan bahwa hubungan internasional mengalami perubahan yang mendasar. Episode sejarah ini menandai tampilnya Amerika Serikat sebagainya satu-satunya negara adikuasa, sekaligus menandakan keunggulan kapitalisme. Keadikuasaan ini identik dengan hegemonisme yang senantiasa diusung oleh para perumus kebijakan luar negeri Amerika Serikat demi mencapai tujuan imperium Amerika. Pada awal lahirnya negara Amerika Serikat dikenal sebagai asal muasal demokrasi modern, para pendiri bangsanya telah dengan tegas menyebut bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik di antara yang terburuk. Namun manusia belum bisa memikirkan sistem yang lebih baik dari demokrasi

1. Amerika Serikat Sebagai Penegak Demokrasi Dunia

Sistem demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang mulia dan terhormat oleh dunia. Sistem yang diperkenalkan dan dipopulerkan oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa sudah menjadi sistem tunggal dan menghegemoni seluruh bangsa yang ada di dunia saat ini. Jika ada negara yang tidak menganut sistem demokrasi dianggap sebagai negara primitive, tirani dan harus diperangi.²³ Sistem ini tidak saja dianut oleh dunia Barat, namun dunia Barat juga memperkenalkan, bahkan memaksakan konsep ini ke dunia ketiga. Terlepas dengan berbagai konspirasi dan tindak kekerasan, negara atas nama rakyat mutlak harus diwujudkan. Padahal, demokrasi bagi para pemikir awalnya dinilai akan mampu meredam sikap dan perilaku barbar manusia. Salah satu definisi penting dari demokrasi seperti yang diungkap Henry B Mayo adalah adanya pembatasan penggunaan kekerasan.²⁴ Tentu saja dalam hal ini adalah penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya dan juga oleh warga negara terhadap warga negara lainnya.

AS sering membanggakan diri sebagai *The Champion of Democracy and The Guardian of Democracy*. Dengan kebanggaan tersebut, AS selalu mendengungkan tekadnya unuk menegakkan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia. Demokrasi dan menghargai hak asasi manusia menjadi komponen utama dari politik luar negeri AS. Menegakkan demokrasi tidak hanya mempromosikan nilai-nilai fudamental AS, seperti kebebasan beragama dan hak-hak para buruh, tetapi juga membantu menciptakan arena global yang lebih aman, stabil, dan

²³ <http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2011/09/28/kebohongan-demokrasi> diakses 27 februari

sejahtera yang mana AS bisa mengembangkan kepentingan nasionalnya. Negara yang diperintah secara demokratis sepertinya ingin menjaga perdamaian, mencegah agresi, mengembangkan pasar terbuka, mempromosikan perkembangan ekonomi, melindungi warga negaranya, memerangi kejahatan dan terorisme internasional, menegakkan hak-hak asasi manusia, menghindari krisis kemanusiaan dan pengungsi, memperbaiki lingkungan global, dan melindungi kesehatan manusia.²⁵ AS yang mendedikasikan diri sebagai sebuah negara demokrasi yang menjunjung asas kebebasan dalam berpendapat dan memberikan ide bagi setiap orang, selanjutnya AS menempatkan dirinya sebagai negara polisi di kancah internasional.²⁶ Namun sebagai polisi dunia AS sering dianggap bertindak semaunya, dengan artian mengatas namakan penegakan demokrasi, AS melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya benar tetapi menghancurkan yang lainnya.

2. Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah

Upaya Amerika Serikat menggenggam kekuasaan di seluruh dunia bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa ditutup-tutupi. Setelah keruntuhan Komunisme yang dimotori bubarnya Uni Soviet, satu-satunya penghalang besar bagi terwujudnya keinginan Amerika adalah Islam. Kekuatan dunia Islam yang berpusat di Timur Tengah mendorong Amerika Serikat perlu melakukan upaya penangkalan dini. Pelaksanaan dari upaya itu adalah dengan melahirkan suatu

²⁵ <http://www.state.gov/g/drl/democ/> diakses 05 desember 2011

²⁶ <http://www.ganto.web.id/index.php?mod=artikel&kat=&id=120&judul=%E2%80%9Cbayang-bitam%E2%80%9D-negara-adikuasa.html> diakses 05 desember 2011

kekuatan tertentu di kawasan Timur Tengah yang bisa menjadi tangan terdekat Amerika dalam mengendalikan perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut.

Presiden-presiden Amerika Serikat seperti Jimmy Carter, Ronald Reagan, dan George Bush sampai masa kepemimpinan anaknya George Walker Bush, tidak ada yang pernah luput dari permasalahan kawasan Timur Tengah. Tercatat bahwa Carter sukses besar ketika berhasil menciptakan perdamaian antara Israel dan Mesir, yang menghasilkan kesepakatan "*Camp David Peace Accord*". Akan tetapi pada saat yang sama, Carter juga dianggap gagal dalam menghadapi revolusi di Iran. Presiden Reagan juga dicatat pernah memainkan peran sebagai "*peace keeping*" di wilayah Libanon pada awal 1980an. Hal ini dilakukan untuk menemukan pasukan AS yang terseret, diserang dan terbunuh di barak mereka pada perang sipil, yang berakhir dengan harus ditariknya pasukan AS dari Libanon.

Sementara itu George Bush berusaha untuk mendorong proses perdamaian Arab-Israel setelah 1989 dan justru terjebak dalam perang melawan Irak pada 1991. Sementara Clinton, datang sebagai presiden yang menentukan konsentrasi pemerintahan lebih kepada masalah-masalah kerjasama domestik. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan ia harus menghadapi kelanjutan konfrontasi AS dengan Sadam Hussen di kawasan Teluk, kebangkitan Iran serta kebangkitan rasa kebersamaan yang tinggi pada masyarakat Muslim di dunia Arab, termasuk proses perdamaian Arab-Israel fundamentalisme.

Tujuan politik dari AS di Timur Tengah sudah pasti menentukan keterlibatan dalam konflik di Timur Tengah dan bagaimana memanfaatkan

konflik tersebut untuk mencapai sasaran-sasaran politik luar negerinya. AS berusaha supaya langkah-langkah taktisnya selalu berjalan sesuai dengan strategi besarnya sehingga mudah di maklumi mengapa terjadi perubahan politik AS di Timur Tengah sesuai dengan perubahan situasi menyeluruh di Timur Tengah. Secara umum keterlibatan AS di Timur Tengah dapat di kelompokkan kedalam dua hal, yaitu keamanan dan ekonomi.

a. Keamanan

AS mendengungkan isu bahaya Islam Fundamentalists sebagai eksklusivisme, fanatisme, dan agresivisme yang berwatak kestasisan yang menentang setiap perkembangan, terikat dengan warisan dan tradisi kuno, tidak toleran, tertutup dan menganut kekerasan dalam bermahzab, beku, penentang dan perlawanan.²⁷ Dengan berbagai alasan keamanan dunia AS melakukan serangkaian tindakan guna menegakkan yang menurutnya keamanan dunia. Untuk itu, beberapa langkah penting yang dilakukan oleh AS adalah memperluas basis militernya di Timur Tengah dengan mendirikan pangkalan-pangkalan militer. Isu yang diangkat adalah senjata pemusnah massal, mendukung terorisme (khususnya Al-Qaida), demokratisasi, rezim diktator, atau mengancam kepentingan nasional AS.

Seperti tindakan Invasi Amerika Serikat terhadap Irak yang dimulai pada bulan Maret 2003. Dimana sebelumnya Pemerintahan Presiden Bush menghadapi tekanan yang kian meningkat, untuk mengadakan penyidikan independen dan menyeluruh atas laporan intelijen tentang *Weapon Mass Destruction* atau senjata

²⁷ <http://canidalegis.wordpress.com/2011/02/04/timur-tengah-middle-east-dulu-sekarang-dan->

pemusnah masal Irak yang berupa senjata-senjata kimia. Laporan intelijen itulah yang dipakai sebagai dalih oleh pemerintahan Presiden George W Bush untuk melancarkan invasi ke Irak pada Maret 2003, guna menyingkirkan pemerintahan Presiden Saddam Hussein. Padahal, The Washington Post melaporkan, penyidikan oleh Kongres Amerika Serikat dan Central Intelligence Agency tidak menemukan bukti bahwa pendapat para analis intelijen yang menyebutkan Saddam memiliki MWD.²⁸

Alasan demokratisasi dilakukan oleh AS untuk mengganti rezim-rezim Arab yang diktator (tidak peduli meskipun sebelumnya rezim ini didukung oleh AS). Dengan alasan ini, AS senantiasa bisa mengancam pergantian rezim di negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Suriah, dan Iran. Dalam invasinya ke Afganistan, pada 7 Oktober 2001, persis sebulan setelah serangan 11 September itu, pesawat-pesawat AS menjatuhkan puluhan rudal jelajah dan bom-bom yang dikendalikan laser ke sasaran-sasaran strategis di Kabul dan kota-kota lain Afghanistan. Serangan itu diikuti dengan satu operasi di darat yang mengalahkan gerilyawan Taliban hanya dalam beberapa pekan. Taliban kemudian melarikan diri ke tempat-tempat persembunyian di Afghanistan dan Pakistan selama beberapa tahun tidak melakukan aktivitas, akibat invasi pasukan pimpinan AS itu. Perang itu dilakukan untuk menggulingkan pemerintah Taliban karena menampung Osama bn Laden yang dituduh terlibat isu terorisme dalam serangan

²⁸ http://www.lampkuinisi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61

11 September 2001 di AS, dan menghancurkan kamp-kamp latihan Al Qaida di Afghanistan.²⁹

Selanjutnya adalah AS memanfaatkan krisis Palestina untuk lebih memperkokoh panjajahnya di kawasan Timur Tengah. Kepentingan yang pertama adalah mengalihkan musuh kaum Muslim kepada Israel. Padahal, musuh yang sebenarnya adalah AS yang terus-menerus mendukung negara Israel. Krisis Palestina yang berkepanjangan ini juga dijadikan alat oleh AS untuk menanamkan pengaruhnya. AS seakan-akan tampil bagaikan pahlawan yang mengajukan perdamaian dalam masalah ini. Maksud sebenarnya adalah untuk selalu berperan dalam krisis di Timur Tengah.³⁰

b. Ekonomi

Dalam hal ekonomi, keterlibatan AS dapat di kelompokkan kedalam dua tujuan yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan pasar senjata. Wilayah Timur Tengah di bawahnya terdapat SDA yang luar biasa, yaitu minyak dan gas bumi. Melalui keberadaan SDA seperti itu, maka negara-negara Timur Tengah bisa menjadi negara dengan tingkat kemakmuran yang memadai. Sebutlah misalnya. Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya adalah contoh beberapa negara yang memperoleh berkah minyak di dalam kehidupan masyarakatnya.³¹

Konsumen minyak bumi terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, Amerika sudah tidak mampu memproduksi minyak bumi sendiri

²⁹<http://internasional.kompas.com/read/2011/10/07/12431190/10.Tahun.Invasi.AS.ke.Afghanistan>.
Diperingati diakses 27 februari 2012

³⁰ <http://sangideologis.wordpress.com/2011/02/04/timur-tengah-middle-east-dulu-sekarang-dan-akan-datang/> diakses 27 februari 2012

³¹ <http://nursvam.sunan-ampel.ac.id/?p=3251> diakses pada tanggal 25 Februari 2012

untuk memenuhi konsumsi dalam negerinya, sehingga ia mulai mengimpor minyak bumi dari negara-negara lain. Pada tahun 1970-an, situasi bertambah parah, karena produksi minyak bumi Amerika sudah mencapai batas maksimalnya. Sejak itu produksi minyak bumi Amerika mengalami penurunan sampai sekarang. Amerika pun tambah bergantung pada impor dari luar.³²

Kalau konsumen terbesar minyak bumi adalah Amerika Serikat, maka produsen minyak bumi terbesar adalah daerah Timur Tengah. Tidaklah begitu mengherankan kiranya jika berbagai konflik di Timur Tengah selalu melibatkan Amerika. Pada awalnya, Amerika berusaha mengontrol daerah Timur Tengah bukan melalui intervensi militer secara langsung, tapi melalui sekutu-sekutunya, yaitu Israel, Arab Saudi dan Iran (pada masa Shah, sebelum Revolusi Iran). Namun setelah embargo minyak OPEC terhadap Amerika pada 1970-an karena dukungan Amerika terhadap Israel dalam perang Arab-Israel yang berdampak pada naiknya harga minyak dunia, dan juga setelah digulingkannya Shah oleh Revolusi Iran, Amerika pun melihat bahwa kontrol hanya melalui para sekutunya tidaklah cukup, dan mulai membuka kemungkinan intervensi militer secara langsung.³³

Bisa jadi juga ada kepentingan militer dalam kontrol atas minyak bumi ini, karena sumber energi utama alat-alat perang adalah minyak bumi, sehingga dalam perang, siapapun yang menguasai minyak bumi, memiliki kelebihan dibandingkan dengan lawannya. Ia bisa mematahkan perlawanan lawannya dengan memotong

³² Heinberg, Richard. *The Party's Over: Oil War and the Fate of Industrial Societies*. Gabriola

supply minyak bumi atas alat-alat perang lawannya.³⁴ Dan hal ini pernah dicoba oleh OPEC dalam perang Arab-Israel dengan mengembargo negara-negara pendukung Israel.

Kemudian, kepentingan minyak ini jugalah yang mendorong pemerintahan Bush melancarkan “Perang Melawan Terror” setelah serangan 9/11. Dalam perang Afghanistan, ada indikasi bahwa perang itu terkait dengan rute pipa minyak yang melewati Afghanistan. Pada akhir tahun 1990-an, sempat terjadi pembicaraan antara sebuah perusahaan minyak Amerika, Unocal yang sekarang sudah bergabung ke Chevron, dengan pemerintahan Taliban, mengenai rute pipa minyak yang melewati Afghanistan. Pembicaraan ini mengalami kegagalan. Menariknya, yang menjadi konsultan Unocal pada saat itu adalah Zalmay Khalilzad yang di masa Presiden Bush, menjadi penasihat keamanan nasional Presiden untuk Afghanistan dan Asia Tengah.³⁵

Perang Irak juga didorong oleh motivasi yang sama, yaitu kepentingan minyak. Kalau dilihat dari alasan resminya, dapat dilihat bahwa argumen pemerintahan Bush selalu berganti-ganti, mulai dari upaya menghubungkan Irak dengan serangan penyakit anthrax di AS, senjata pemusnah massal, persekutuan Saddam dengan Osama dan Al Qaida, sampai ke perlunya digantikan kediktatoran Saddam dengan demokrasi. Dan nyaris semua tuduhan pemerintahan Bush kepada Saddam tidak terbukti. Baru pada Juni 2003, tidak sampai sebulan setelah Bush mengumumkan secara resmi berakhirnya perang Irak, Wakil Sekretaris

³⁴ Harvey, David. *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press, 2003

³⁵ Engdahl, William. *A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order*, ed. rev. London: Pluto Press, 2004.

Pertahanan AS, Paul Wolfowitz, menyebutkan tujuan sebenarnya dari perang Irak di hadapan sebuah konferensi di Singapura.³⁶

Dalam hal penjualan senjata, perusahaan-perusahaan Amerika yang memproduksi peralatan tempur dan kedirgantaraan menikmati keuntungan besar karena menguasai hampir 54 persen penjualan senjata di kawasan Timur Tengah sepanjang tahun 2005-2009.³⁷ Hal tersebut terungkap dari hasil riset Stockholm International Peace Reserch Institute (SIPR). Menurut lembaga itu, AS menjadi pemasok utama senjata-senjata militer canggih ke Uni Emirat Arab (UAE) dan berhasil merebut pangsa pasar Perancis yang hanya menguasai 21 persen penjualan senjata di negeri emirat itu.

Volume impor persenjataan oleh UAE meningkat dengan jumlah signifikan selama satu dekade belakangan ini dan negara ini nampaknya tetap akan menjadi negara yang paling banyak mengimpor senjata dalam beberapa tahun mendatang. Laporan itu juga menyebutkan bahwa negara Qatar merupakan pasar terbesar penjualan senjata AS di Timur Tengah. Negara itu membeli hampir 98 persen persenjataannya dari AS selama periode 4 tahun. Sedangkan di UAE yang menjadi pasar terbesar persenjataan konvensional perusahaan-perusahaan AS memenangkan sekitar 60 persen kontrak pembelian senjata negeri itu. AS juga sudah menandatangani kontrak penjualan senjata dengan Arab Saudi senilai 60 miliar dollar dan menjadi kontrak penjualan senjata terbesar yang pernah ditandatangani oleh kedua negara tersebut itu. Saudi menghabiskan anggaran sekitar 37 miliar dolar untuk pembelian senjata antara tahun 2001 dan 2008. Perusahaan-

³⁶ *ibid*

³⁷ <http://www.erasmuslim.com/berita/dunia/timur-tengah-iadi-nasar-terbesar-penjualan-senjata->

perusahaan persenjataan AS masih akan menuai keuntungan besar puluhan tahun mendatang, karena sudah merencanakan pengiriman pesanan senjata berat militer senilai 122 miliar dollar ke negara-negara Arab sekutu Washington. Arab Saudi misalnya, sudah memesan paket persenjataan dalam jangka waktu 15-20 tahun mendatang, antara lain 84 pesawat tempur F-15, 70 helikopter tempur jenis Apache dan 72 helikopter jenis Blackhawk, 36 helikopter ringan dan ribuan bom pintar berpenuntun laser.³⁸

B. Dinamika Palestina

Permasalahan Palestina bermula dari perkembangan sejarah yang sangat panjang yang dihayati oleh dua macam bangsa di negeri itu, yakni bangsa Arab dan bangsa Yahudi, kehadiran pertama orang Yahudi di "Tanah yang Dijanjikan" adalah sekitar 1800 SM. Hingga sampai saat itu problematika seperti itu belum juga terselesaikan serta belum ada solusi yang kongkret untuk permasalahan tersebut, bisa dikatakan konflik Palestina-Israel berawal dari konflik Arab-Israel.

1. Sejarah Palestina

Negeri Palestina dinamai menurut bangsa Filistin (Pelishtim dalam bahasa Ibrani) yang menetap di daerah pantai Laut Tengah dari Yope sampai Gaza sekitar tahun 1300-1200 SM. Menurut Alkitab, orang-orang Filistin berhubungan dengan orang Kaftor, yang biasanya dikaitkan dengan pulau Kreta.³⁹ Sebelum orang Filistin bermigrasi daerah itu dikenal sebagai Kanaan. Nama ini mengandung arti "negeri ungu" dan barangkali nama itu diambil dari bahan pewarna ungu yang

³⁸ Riset Military Spending and Arms Procurement in Gulf States

dihasilkan oleh orang pribumi dari sejenis kerang-kerangan yang banyak terdapat sepanjang pantai Laut Tengah.

Palestina seringkali disebut sebagai pusat geografis dan teologis dari dunia purbaka. Negeri ini tidak hanya terletak di persimpangan jalan jalur-jalur perdagangan yang penting pada zaman purbakala tetapi juga di daerah Yudaisme, Kekristenan, dan Islam mengawali keberadaan mereka. Luas negeri itu sekitar 242 km dari Dan ke Bersyeba (utara- selatan) dan 160 km dari Laut Tengah ke sungai Yordan (timur-barat). Iklimnya normal bagi daerah Timur Dekat, musim dinginnya bergantung pada ketinggian, dengan sedikit salju di tempat- tempat yang lebih tinggi. Musim hujan berlangsung dari Oktober sampai April, dengan musim panas yang kering, tidak berawan dari bulan Mei sampai bulan Agustus.

Negeri Palestina terbagi dengan mudah dalam empat daerah geografis utama yang membujur dari utara ke selatan: dataran pantai, daerah perbukitan tengah, celah Yordan, dan dataran tinggi Transyordania. Pembagian geografis utama Palestina yang melintang dari timur ke barat berkaitan dengan segi-segi geografis negeri itu dan tapal batas politis dari dua kerajaan Israel yang pecah. Pembagian ini meliputi daerah Galilea di utara, Samaria dan di daerah utara-tengah Palestina. Yehuda di bagian selatan-tengah Palestina, dataran Negev (atau padang rumput kering) di selatan, dan semenanjung Sinai yang membentuk perintang besar antara Palestina dan Mesir.⁴⁰ Wilayah Palestina pada mulanya ditinggali oleh beberapa bangsa, yaitu bangsa Ammonit dan Philistine. Lalu, sekitar tahun 1000 SM, Palestina ditaklukan oleh Raja Thalut dan Daud a.s. Daud

⁴⁰ <http://www.sarapanpagi.org/negeri-palestina-yl1672.html> diakses 30 Januari 2012

a.s dan keturunannya, yang merupakan bangsa yahudi, akhirnya menjadi raja di sana dan Palestina menjadi tanah air bangsa yahudi dari 1000 SM – 135 M. Palestina sendiri sempat dikuasai oleh Kerajaan Persia, Babilonia, Mesir, dan kerajaan-kerajaan lain secara bergantian dalam rentang waktu tersebut.⁴¹

2. Identitas Palestina

Rakyat Palestina pada hakekatnya dapat dimobilisasi dengan baik setelah trauma 1948, situasi revolusioner sedikit banyak telah meliputi massa rakyat Palestina setelah nakba 1948 tersebut dan gerakan-gerakan revolusioner muncul dikalangan mereka yang berfungsi sebagai katalisator semangat revolusioner sekaligus sebagai identitas dari bangsa Palestina, dukungan politik dari negara-negara Arab yang cukup representatif terhadap penduduk Palestina untuk memperjuangkan haknya yang telah dirampas oleh Zionis Israel.

a. Gerakan Intifadhah

Tanggal 8 Desember 1987 telah menjadi hari bersejarah bagi perjuangan Palestina. Dimana pada saat itu menjelma sebuah gerakan perlawanan yang menjadi ruh dan satu kesatuan gerakan total bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebuah gerakan pembebasan yang memunculkan keinginan untuk bangkit atas ketidakadilan dan segala bentuk kedholiman yang dilakukan penjajah israel, yaitu lahirnya gerakan Intifadhah.⁴²

Gerakan intifadhah ini telah mengobarkan asa yang begitu mendalam. Melahirkan ribuan syuhada yang rela mati demi tanah dan dinul islam. Tak

⁴¹ <http://ivannugraha.wordpress.com/2009/01/23/sejarah-palestina/> diakses 31 januari 2012

⁴² http://nipponori.multiply.com/journal/item/29/Intifadhah_1_Perjuangan_Palestina?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem diakses 31 januari 2012

terhitung tokoh yang telah menggoreskan tinta emas dalam sejarah intifadhah ini. Sebut saja Imad Aqil, yang tentara Israel harus mengepung dan membunuhnya menggunakan panser dan helikopter. Yahya Ayyash, sang insinyur yang disebut israel sebagai musuh nomor satu. Syaikh Ahmad Yassin, penggerak perjuangan yang sangat kharismatik dari atas kursi roda. Dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan kini terdapat jutaan pejuang-pejuang muda yang tumbuh menggantikan mereka.

b. Lahirnya Fatah dan Hamas

1) Fatah

Fatah atau Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina, adalah sebuah partai politik di Palestina yang didirikan pada tahun 1958. Partai ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik Israel dan Palestina. Fatah sebenarnya secara teknis bukan merupakan partai politik, namun adalah faksi terbesar dalam PLO, sebuah konfederasi multipartai.

Fatah didirikan pada tahun 1958 atau 1959 oleh sekelompok warga Palestina yang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir salah satunya Yasser Arafat. Setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, Fatah muncul sebagai kekuatan yang dominan dalam dunia politik di Palestina. Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO dan pada tahun 1969 menjadi pemimpin dalam PLO. Sejak saat itu, Arafat menjadi pemimpin PLO dan Fatah hingga meninggal dunia pada tahun 2004. Posisinya sebagai ketua Fatah digantikan Faruq al-Qaddumi. Kelompok ini terlibat konflik dengan kelompok Hamas setelah

kemenangan kelompok Hamas pada Pemilu parlemen tahun 2006 lalu di Palestina.⁴³

2) Hamas

Hamas adalah kependekan dari Harokah al Muqowamah al Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam, didirikan pada tanggal 14 Desember 1987 M oleh Syekh para syuhada Ahmad Yasin bersama dengan beberapa orang yang meyakini pemikiran gerakan dan manhajnya.⁴⁴

Adapun tahapan-tahapan dari berdirinya gerakan ini adalah:

Fase 70-an : Harokah (Gerakan) sudah mampu berperan dalam meletakkan dasar dan memunculkan kelompok-kelompok islam di berbagai yayasan dan asosiasi. Dari sinilah muncul perkumpulan dan lembaga islam hingga terbentuknya Universitas Islam.

Awal 80-an : Harokah semakin solid dalam aspek tanzhim (organisasi) dan ta'thir (ruang lingkup). Pada fase ini harokah merasakan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Zionis. Di tahun 1983 dibentuklah suatu komisi militer yang melakukan berbagai gerakan-gerakan rahasia untuk melindungi kerja-kerja militer hingga terbentuk Organisasi Jihad dan Dakwah (MAJD).

Tahun 1987 : Harokah mulai melakukan aksi-aksi massa untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Zionis melalui berbagai demonstrasi dan

⁴³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Fatah> diakses 31 Januari 2012

⁴⁴ http://www.lintas.me/go/cultone.wordpress.com/Sejarah_HAMAS/1/ diakses 9 februari 2012

penyebaran pamflet kepada rakyat Palestina di daerah Gaza demi memberikan penyadaran dan kewaspadaan terhadap berbagai cara-cara penundukan yang dilakukan musuh.

Desember 1987: Terjadi percikan pertama yang memunculkan Hamas dikarenakan tindakan penganiayaan Zionis terhadap hak-hak rakyat Palestina hingga sampai tahap yang sudah tidak bisa ditahan. Kehormatan dan hak-hak rakyat Palestina dihina dan direndahkan yang menyebabkan munculnya revolusi. Munculnya Gerakan Intifadhah (gelombang perlawanan) bulan Desember 1987 diawali dengan berbagai pemberontakan, revolusi, demonstrasi dan aksi-aksi yang menunjukkan penolakan rakyat Palestina. Pada bulan-bulan itu juga para tokoh Gerakan Ikhwan memberikan berbagai pelatihan dalam menciptakan perlawanan massa dan penyebaran berbagai pamflet untuk menggiring opini umum dalam menentang pendudukan Zionis.

6 Desember 1987: Terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang supir sebuah Truk Zionis yang menabrakkan kendaraannya ke sebuah mobil kecil yang membawa para pekerja Arab dan mengakibatkan 4 orang penduduk Palestina syahid. Kejadian tersebut menandai munculnya tahapan baru dalam jihad rakyat Palestina. Para tokoh Gerakan Ikhwan di Gaza mulai melatih para mahasiswa cara-cara berdemonstrasi. Mereka pun rela menutup kampusnya pada hari-hari demonstrasi. Mereka terus menerus melakukan berbagai demonstrasi baik siang maupun malam sehingga berhasil mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat Palestina bahkan rakyat pun ikut turun ke jalan

bersama para mahasiswa menentang pendudukan Zionis. Inilah yang menjadi percikan pertama dari kemunculan intifadhah yang penuh berkah.

14 Desember 1987 : Merupakan tahapan baru dalam jihad rakyat Palestina menentang pendudukan Zionis zhalim yaitu tahapan yang mencerminkan gelombang perlawanan islam. Pada awalnya dinamakan **حماس** (Hamas) namun setelah beberapa hari diganti menjadi **حماس** (Hamaas) kata yang berarti kekuatan dan aktivitas.

Kelahiran Hamas ini diprakarsai oleh para tokoh Ikhwan yang berjumlah 7 orang. Mereka mengadakan pertemuan di wilayah Gaza setelah kejadian truk 6 Desember 1987 yang kemudian menghasilkan Hamas. Ketujuh orang pendiri Hamaas itu adalah Syeikh Ahmad Yasin, DR. Ibrahim al Bazuri, Muhammad Syam'ah (perwakilan di kota Gaza), Abdul Fatah Dakhon (Perwakilan Wilayah Tengah), DR. Abdul Aziz ar Rantisi (Perwakilan Khan Yunus), Isa an Nasyar (perwakilan kota Rafah), Shalah Syahadah (Perwakilan Wilayah Utara).

Gerakan Hamas ini membuat panik pendudukan Zionis sehingga pada tahun 1988 mereka melakukan banyak penangkapan dan pengusiran tidak terkecuali para pendiri gerakan kecuali Syeikh Ahmad Yasin yang baru dipenjarakan pada tahun 1989. Berbagai penangkapan terhadap para pemimpin Hamas di level pertama terus dilakukan namun itu semua tidak menghentikan regenerasi kepemimpinan dalam tubuh Hamas hingga sampai level kelima. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan Zionis itu tidak berpengaruh apa-apa apalagi menghentikan gerakan Hamas juga menggunakan masiid dalam

membangkitkan kesadaran dan perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Zionis, yang kemudian gerakan itu dikenal dengan “Tsaurotul Masjid” (Revolusi Masjid).

Hamas adalah sebuah Gerakan Jihad, Da’wah dan Politik, ia berdiri di atas Syumuliyatul Islam (Universalitas Islam) yang mencakup semua aspek kehidupan. Hal itu dibuktikan dengan masuknya Hamas ke medan politik dan ikut serta dalam Pemilu bahkan bisa memenangkannya. Sejak awal, sebenarnya Hamas sudah menunjukkan keuniversalannya, seperti memiliki Yayasan-yayasan Sosial, Pendidikan, politik dan Jihad. Masuknya Hamas ke medan perpolitikan adalah proses alami yang bertujuan membenahi berbagai penyimpangan yang ada didalam berbagai peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip rakyat Palestina dan memberikan perlindungan terhadap berbagai kekayaan dan hak-hak mereka.⁴⁵

Sasaran utama Gerakan Hamas adalah mendirikan negara Palestina diatas seluruh tanah Palestina melalui jihad yang diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Didalam Manifestasi Gerakan dijelaskan bahwa kemunculan Intifadhah adalah demi iizzah dan kemuliaan rakyat Palestina sebagaimana disebutkan “Demi mengembalikan hak-hak kami di negara kami dan meninggikan Panji Allah di bumi.” Kemudian ditegaskan lagi didalamnya bahwa “Intifadhah (Perlawanan masal) rakyat kami adalah untuk berjaga-jaga di bumi yang sedang dijajah ini. Intifadhah lahir untuk menentang politik pemaksaan Zionis dan untuk

⁴⁵ disarikan dari hasil wawancara www.ikhwanonline.net dengan H. Muhammad Syam’ah, salah

memberikan penyadaran kepada setiap sanubari“. Pemahaman aqidah Hamas bersandar kepada Al Qur'an dan Sunah Nabi. Kemunculan Hamas diprakarsai oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin dan Hamas adalah salah satu sayap dari Gerakan Ikhwan.

Pasal Pertama di dalam Piagam Gerakan disebutkan bahwa manhaj Hamas adalah islam. Hamas menjadikan islam sebagai sumber pemikiran dan pemahamannya terhadap alam, kehidupan, manusia, kepadanya mereka berhukum dalam setiap prilakunya dan segala langkah-langkahnya juga merujuk kepadanya.

Hamas adalah salah satu mata rantai dari mata rantai-mata rantai jihad dalam memerangi orang-orang Zionis yang kemunculannya memiliki kaitan erat dengan asy Syahid Izzudin al Qossam dan para mujahidin Ikhwanul Muslimin tahun 1936, yang kemudian juga merupakan kelanjutan dari jihad rakyat Palestina dan jihad Ikhwanul Muslimin di dalam perang 1948 serta berbagai operasi jihad Ikhwan Muslimin di tahun 1967.

Adapun struktur Hamas terbagi menjadi 4 sayap yang saling terpisah :

1. Sayap Mobilisasi Massa
2. Sayap Keamanan (dahulu bernama MAJD) yang dibentuk pada tahun 1983
3. Sayap Militer (Batalyon Asy Syahid Izzuddin Al Qossam), sebelumnya bernama "Mujahidu Filistinin" atau "Al

Hamis berkeyakinan bahwa peperangan dengan Zionis di Palestina adalah peperangan eksistensi yang tidak mungkin dihentikan kecuali setelah berbagai penyebabnya dilenyapkan yaitu pendudukan Zionis di bumi Palestina dan perampasan tanah-tanahnya serta pengusiran para penduduknya.⁴⁶

c. PLO

Palestina Liberation Organitations (PLO) atau Organisasi Pembebasan Palestina didirikan pada bulan Mei 1964 di Yordania. Organisasi Pembebasan Palestina adalah kelompok yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai organisasi Arab di bawah satu naungan. Tujuan utama dari PLO adalah untuk mendapatkan (meskipun dari sudut pandang mereka mendapatkan kembali) tanah yang diserahkan oleh PBB ke Israel.⁴⁷

Dalam masa pertumbuhannya, PLO tidak dikaitkan dengan kekerasan. Tapi pada tahun 1967, telah didominasi oleh sebuah organisasi bernama Al Fatah. Yang dipimpin oleh Yasir Arafat kemudian menjadi lebih ekstrim. sehingga Israel menjadi lebih sukses secara militer (1967 dan 1973) dan Israel menjadi lebih keras dalam merebut tanah dan menaklukan wilayah Arab (Sinai dan Dataran Tinggi Golan pada khususnya). Bahkan PLO dikembangkan menjadi lebih ekstrim. Mungkin dua yang paling terkait dengan terorisme adalah 'Black September' dan 'Front Palestina untuk Pembebasan Palestina'. Kedua kelompok percaya bahwa satu-satunya cara Israel bisa dipaksa menyerahkan kembali tanahnya dengan cara

⁴⁶ disarikan dari islamweb.net

⁴⁷ <http://www.bistrolerningsite.co.uk/palestinian-liberation-order.htm> di akses pada tanggal 09

menggunakan kekerasan dan pengeboman, pembajakan dan pembunuhan menjadi modus operandi mereka.⁴⁸

Organ utama dari lembaga ini ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Yang terpenting ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 anggota yang juga merupakan Parlemen Palestina.⁴⁹

Selanjutnya manuver politik yang dilakukan oleh PLO untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina ialah dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan Intifadah sejak tahun 1987. Sebagian faksi militan militer menolak mengakui Resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah belah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.

Pada 15 November 1988, sebuah langkah besar dilakukan oleh PLO, yaitu mengumumkan berdirinya negara Palestina dari markas besarnya di Algiers,

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pembebasan_Palestina di akses pada tanggal 09 Februari

Aljazair. Bersamaan dengan ini PLO mulai mendirikan kantor kedutaannya di berbagai negara Timur Tengah dan di Indonesia.

PLO mendapatkan status peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974.⁵⁰ Dengan pengakuan terhadap Negara Palestina, PBB mengubah status peninjau ini sehingga dimiliki oleh Palestina pada 1988.⁵¹ Pada Juli 1998, Sidang Umum menerima sebuah resolusi baru (52/250) yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privilese tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan Timur Tengah. Dengan resolusi ini, "tempat duduk untuk Palestina akan diatur tepat setelah negara-negara non-anggota dan sebelum peninjau-peninjau lainnya." Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.⁵²

d. Otoritas Nasional Palestina

Otoritas Nasional Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlemerter yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia

⁵⁰ Resolusi Sidang Umum no. 3237

⁵¹ Resolusi Sidang Umum no. 43/177

⁵² <http://vancouvermakaruku.blogspot.com/2009/08/hamas-dan-plo.html> diakses pada tanggal 09

yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.⁵³

Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:

- 1) Komite Eksekutif.
- 2) Kesatuan Lembaga Penerangan.
- 3) Lembaga Kemiliteran Palestina.
- 4) Pusat Riset Palestina.
- 5) Pusat Tata Perencanaan Palestina.

Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran.

⁵³ http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Nasional_Palestina di akses pada tanggal 09 Februari 2012

Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.

C. Hubungan AS dan Palestina

Rencana AS dalam mempertimbangan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dimulai sudah pada bulan Juni 1967, setelah Perang Enam Hari. Sebelum Perang Yom Kippur pada bulan Oktober 1973, pemerintah AS dianggap PLO dan Fatah di bawah kepemimpinan Yasser Arafat itu sebagai organisasi teroris, dan sebagai hasilnya tidak mendukung aspirasi rakyat Palestina di PBB, dan diplomat AS di Timur Tengah secara eksplisit diperintahkan oleh Departemen Luar Negeri tidak pernah melakukan kontak dengan Arafat atau perwakilan atas namanya.

Pada tanggal 3 November 1973 sebuah pertemuan rahasia diadakan di Maroko antara Deputy Direktur CIA Vernon A. Walters dan Khaled al-Hassan, membahas kemungkinan mengintegrasikan PLO ke proses perdamaian. Meskipun ada kesepakatan nyata yang dicapai pada pertemuan itu, hal itu mengarah pada pengekangan serangan Fatah terhadap sasaran-sasaran AS. Dari tahun 1974 dan

seterusnya, beberapa kalangan di Departemen Luar Negeri sedang mempertimbangkan untuk menerima PLO sebagai mitra perdamaian proses di Timur Tengah. Pada bulan Juni 1974, Duta Besar AS untuk Mesir Eilts Herman menilai bahwa Ketua PLO Yasser Arafat sedang mencari cara untuk mengintegrasikan PLO ke dalam proses perdamaian

Pada tanggal 14 November 1974, Ford membuat pernyataan tidak terlalu berkomitmen pada posisi AS terhadap PLO dengan mengatakan bahwa Israel tidak akan pernah bernegosiasi dengan PLO. Namun, karena dukungan AS, pemerintah Israel sepakat pada 1975 untuk menuntut pengakuan eksplisit PLO dari Negara Israel sebagai prasyarat untuk setiap berurusan dengan perwakilannya. Mengacu pada ini, Ford mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 26 November 1975 Palestina tidak mengakui Negara Israel. Dan dalam situasi ini, tidak mungkin untuk membawa Palestina dan Israel bersama-sama untuk bernegosiasi. Jadi, kecuali ada beberapa perubahan sikap mereka. PLO tidak membuat pengakuan tersebut secara eksplisit pada waktu itu, pemerintah AS menahan diri dari setiap hubungan resmi dan PLO tidak diizinkan untuk mempertahankan setiap kantor di wilayah AS, kecuali untuk Misi PLO untuk PBB, yang kebal dari hukum AS. Perubahan sikap tertentu terjadi di bawah Presiden Jimmy Carter. Carter adalah presiden AS pertama yang menganjurkan pembentukan negara Palestina, yang ia lakukan pada pertemuan yang diadakan di Clinton, Massachusetts pada tanggal 16 Maret 1977. Harus ada sebuah tanah air yang disediakan untuk pengungsi Palestina yang telah menderita selama bertahun-tahun. Pada tahun 1978 PLO diizinkan untuk mendirikan Kantor Informasi Palestina di Washington DC. Sebuah sikap yang lebih keras terhadap PLO

diambil oleh Presiden Ronald Reagan .⁵⁴ Program partai Republik disetujui pada tahun 1980 menyatakan bahwa Partai Republik menolak panggilan untuk keterlibatan PLO tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang dari Israel atau orang-orang Arab Palestina. Para imputasi legitimasi organisasi belum mau mengakui hak mendasar bagi keberadaan Negara Israel adalah salah. Pembentukan Negara Palestina di Tepi Barat akan menjadi tidak stabil dan berbahaya bagi proses perdamaian. Presiden Reagan terus menentang pembentukan negara Palestina atau negosiasi dengan PLO.

Pada bulan September ia membuat proposal untuk otonomi Palestina di bawah pengawasan Yordania. Meskipun rencana tersebut tidak menghubungi untuk setiap partisipasi PLO, beberapa kalangan PLO melihat ini sebagai tanda kemungkinan bahwa pemerintahan Reagan mungkin mempertimbangkan akomodasi dengan PLO di kemudian hari. Upaya untuk menutup Kantor Informasi Palestina dibuat setelah berlalunya UU anti terorisme pada Desember 1987. Tindakan ini menyatakan PLO sebuah organisasi teroris dan melarang semua kegiatan kecuali untuk penyebaran informasi. Reagan kemudian menyatakan bahwa ia tidak punya niat untuk membangun hubungan diplomatik dengan PLO. Pemerintah AS berusaha untuk menutup Kantor Informasi Palestina dengan alasan bahwa organisasi tersebut terlibat dalam kegiatan teroris, tetapi berbagai pengadilan di Amerika Serikat memutuskan tetap memperbolehkan kegiatan kantor tersebut tetapi dibawah pengawasan ketat.

⁵⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine%E2%80%93United_States_relations diakses pada tanggal

Palestina - Amerika Serikat sebenarnya tidak memiliki hubungan diplomatik dalam arti normal, karena Amerika Serikat tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, dan pemerintah AS sangat berhati-hati untuk tidak mendefinisikan hubungan dengan entitas sub-negara sebagai sepenuhnya diplomatik. Namun, semacam hubungan antara pemerintah AS dan PLO ada sejak tahun 1970. PLO diwakili di Washington oleh Delegasi Umum. Pemerintah AS tidak memiliki kantor perwakilan resmi di dalam wilayah Otoritas Palestina, namun memiliki Konsulat Jenderal di Yerusalem , yang menangani hubungan dengan Otoritas Palestina.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran AS dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya Palestina menjadi sangat penting. Bagaimana dukungan AS atas Palestina guna penyelesaian konflik yang terjadi di tanah itu dan menjadikan sebuah negara yang berdaulat bagi Palestina dapat ditunjukkan secara nyata. Konflik yang berkepanjangan dan berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan yang tak kunjung membuahkan hasil menjadikan Palestina harus memiliki usaha baru atau jalan lain untuk diakui sebagai sebuah negara yang